

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA DATAH BILANG BARU KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU

Titus Bernadus Tului¹

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak pemekaran wilayah kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat di desa datah bilang baru kecamatan long hubung kabupaten mahakam ulu, serta faktor yang menghambat dan mendukungnya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan mengambil sampel kepada pihak yang dianggap paling mengetahui tentang obyek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemekaran wilayah kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat di Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat beberapa aspek yaitu pendapatan perkapita, Kesehatan dan Pendidikan yang telah mengalami peningkatan setelah dilakukannya pemekaran wilayah. Akan tetapi terdapat kendala yang menyebabkan dampak pemekaran wilayah kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat di desa datah bilang baru kecamatan long hubung kabupaten mahakam ulu tidak maksimal, seperti: sarana akses jalan, lapangan pekerjaan, kurangnya Tenaga pengajar dan tenaga medis dan sarana kesehatan yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai bentuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Datah Bilang Baru

Kata Kunci: *Pemekaran wilayah, kesejahteraan masyarakat, pendapatan perkapita, pendidikan, kesehatan.*

Pendahuluan

Pada dasarnya pemekaran wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu bertujuan untuk memajukan daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui otonomi daerah. Akan tetapi pada saat ini, masih banyak daerah atau desa pemekaran belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: titustuluy@gmail.com

belum terwujudkan. Sebagaimana pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu yang menegaskan bahwa sarana dan infrastruktur daerah yang mulai memadai, dan pengelolaan lapangan pekerjaan yang belum mampu menyerap sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Meskipun secara fisik hal ini terlihat secara nyata adanya, tetapi hal ini belum menjadi sebuah tolak ukur atas keberhasilan pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah melaksanakan proses pemekaran wilayah ini.

Masalah yang masih dihadapi atas pemekaran wilayah bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya yaitu, kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan tugas rumah dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan beberapa pejabat lainnya. Dimana masyarakat yang telah memiliki pendidikan yang tinggi masih melakukan pekerjaan bertani dikarenakan faktor lapangan pekerjaan yang ada di instansi sangat terbatas.

Dampak pemekaran wilayah dari setiap desa yang ada hampir sama dari segi sumber daya manusia yang kurang, pembangunan desa yang tidak merata, akses pelayanan publik yang lambat, pemerataan ekonomi yang kurang baik. Hal tersebut juga dirasakan oleh Desa Datah Bilang Baru akibat dampak pemekaran wilayah dimana permasalahan terkait tingkat kesejahteraan masyarakat berupa pendapatan, pembangunan dalam hal ini sarana berupa gedung pertemuan, pendidikan dan kesehatan masih belum maksimal pembangunannya, akses jalan masih berupa tanah merah dan hujan menjadi licin, sumber air bersih yang masih belum tersedia seutuhnya dikarenakan pembangunan bendungan yang terhenti, batas wilayah desa dengan desa lainnya terkait tanah adat membuat lambat pembangunan untuk dilaksanakan. Hal ini lah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai dampak dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Datah Bilang Baru.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di desa Datah Bilang Baru dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Desa Datah Bilang Baru yaitu pada awalnya berjumlah 397 jiwa dan sekarang sudah berjumlah 880 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tersebut, secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Berdasarkan pertimbangan tersebut, desa Datah Bilang Baru dianggap sudah tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti lamanya rentang waktu penyelesaian dalam pengurusan suatu pelayanan administrasi, tidak efektifnya penggunaan dana, tidak tersediannya tenaga layanan publik, dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik, pembangunan yang berjalan lambat. Peran anggaran pemerintah daerah pemekaran dalam mendorong perekonomian, relatif kurang optimal dibandingkan dengan desa yang ada di Kecamatan Long Hubung dan dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran belum dapat mengejar ketertinggalan desa lainnya, serta urusan pembinaan untuk kemasyarakatan yang

menjadi kurang fokus, sehingga pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu”.

Kerangka Dasar Teori

Pembangunan

Pembangunan pada prinsipnya memiliki arti luas, secara sederhana pembangunan adalah perubahan kearah lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Dilaksanakannya proses pembangunan tidak lain karena ada perasaan tidak puas dari individu maupun masyarakat dari keadaan yang dialami saat ini. Namun demikian, perlu didasari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga perlu adanya tindakan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki terhadap setiap masalah yang sedang dihadapi (Riyadi dan Bratakusumah, 2005:45).

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011:9-11).

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Rochajat, dkk, 2011:3).

Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil (Poerwadarminta, WJS., 2011:34).

Dampak Positif Pemekaran Wilayah

Pembentukan kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan pada adanya dampak positif yang akan di rasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri, termasuk kebijakan mengenai pemekaran wilayah. Berikut ini

beberapa dampak positif dari adanya pemekaran wilayah: (Kartasasmita. 2007:46)

- 1) Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu persatu
- 2) Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan daerah baru tersebut. Dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
- 3) Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk di jangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah.
- 5) Pemekaran wilayah juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena pelayanan serta kontrol dan fokus pemerintah meningkat pada daerah otonomi baru, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan menurunnya segala bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat.
- 6) Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Dampak Negatif Pemekaran Wilayah

Tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan karena adanya suatu pemekaran wilayah, namun pada kenyataan ada pula dampak negatif dari pemekaran wilayah terlepas dari tujuannya demi kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa dampak negatif dari pemekaran wilayah : (Kartasasmita. 2007:52)

1. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan daerah maupun wilayah secara keseluruhan sebagai suatu negara.
2. Pemekaran wilayah akan berdampak pada keadaan pemerintahan pusat yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk bersaing dalam upaya memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing.
3. Adanya pemekaran wilayah juga dapat memicu munculnya bentuk-bentuk konflik sosial dan berbagai macam contoh masalah sosial dalam masyarakat

semakin tinggi, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, asal daerah. Yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk berusaha berdominan satu sama lain.

4. Memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi bahkan berkemungkinan berjalan tidak sehat, serta menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Pemekaran wilayah juga berdampak pada lebih dominannya kepentingan pemerintah daerah yang baru, seperti upaya menyelaraskan dengan pemerintahan daerah lainnya dibanding mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Pemekaran wilayah menurut Effendy (2008:2) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah.

Istilah pemekaran berasal dari kata “mekar” dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak”. Dari kata mekar, maka pemekaran artinya pengembangan atau membentuk menjadi banyak. Dalam Undang-Undang pemekaran wilayah Nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan daerah dimana pembentukan suatu wilayah/daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian, pemekaran desa/kelurahan yang dimaksud dalam penulisan ini sama dengan pemecahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan umum. Penyebutan kata pemekaran untuk menggantikan istilah pemecahan desa sudah merupakan istilah yang lazim digunakan baik masyarakat akademik maupun masyarakat pedesaan. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 1981 tentang pembentukan, pemecahan dan penghapusan desa yang menjelaskan bahwa pemecahan desa adalah tindakan mengadaakan desa/kelurahan dibawah wilayah desa yang sudah ada.

Selain Undang-Undang diatas pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 tahun 1999 pada bab II pasal 2 dan 3. Dalam pasal 2 keputusan tersebut disebutkan bahwa : (1) Desa dibentuk di kawasan pedesaan dengan memperhatikan persyaratan, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya dan kondisi lainnya (2) Desa dan kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memadai.

Persyaratan dapat dihapus dan digabung setelah di musyawarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pada pasal 3 dijelaskan lebih rinci dan riil mengenai pemekaran desa, pada pasal ini juga menyebutkan bahwa : (1) pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di usulkan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati (2) Usul kepala desa sebagaimana di maksud dalam ayat 1, Bupati diminta persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (3) atas persetujuan DPRD, bupati menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.

Pemekaran dilakukan bertujuan untuk segera mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sebab penumpukan pembangunan pada satu kawasan jelas tidak adil. Maka untuk segera mewujudkan keadilan itu satu-satunya jalan adalah dengan pemekaran wilayah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, dimana penulis dalam hal ini menggambarkan keadaan gejala-gejala tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Kesejahteraan masyarakat sesudah pemekaran di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, meliputi :
 - a. Pendapatan perkapita
 - b. Pendidikan
 - c. Kesehatan
2. Faktor yang memengaruhi Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Kesejahteraan masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Hasil Penelitian

Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Kesejahteraan masyarakat sesudah pemekaran di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu

1. Pendapatan perkapita
Pendapatan perkapita masyarakat Desa Datah Bilang Baru sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dan pendapatan tersebut meningkat setelah dilakukan pemekaran wilayah meskipun besaran pendapatan belum sepenuhnya mensejahterahkan masyarakat mengingat kebutuhan setiap tahunnya selalu bertambah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pemekaran pendapatan perkapita masyarakat rata-rata 12.287.500/tahun dengan jumlah tanggungan 4 orang. Sedangkan setelah pemekaran pendapatan perkapita masyarakat meningkat menjadi 13.215.833/tahun dengan jumlah tanggungan 4 orang dan selisih kenaikan sebesar 928.333 dengan tingkat persentase kenaikan 9,29% pertahun.

Meningkatkan pendapatan merupakan cita-cita oleh setiap orang dalam hal ini untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pemekaran diharapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Artinya dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten diharapkan pemerintah desa mampu menciptakan lapangan kerja, karena wilayah kerjanya sudah relatif besar sehingga potensi yang tersedia dapat bermanfaat dengan baik, yang pada gilirannya dapat menambah pendapatan masyarakat. Pemekaran wilayah kabupaten sangat menimbulkan dampak positif terhadap pengembangan dan pembangunan di Desa Datah Bilang Baru, terutama dalam hal peningkatan pendapatan karena dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten pendapatan di masyarakat dapat meningkat dan peningkatan pendapatan di Desa Datah Bilang Baru setelah mekar sangat membantu menambah pendapatan masyarakat dalam halnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan karena pemerintah Desa Datah Bilang Baru selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Hal ini sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Kuncoro (2013:417) bahwa pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata produk suatu Negara pada waktu tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai pendapatan nasional bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Sehingga taraf hidup masyarakat atau individu ditinjau dari sudut pandang ekonomi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pendapatan mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp.928.333 dengan tingkat persentase kenaikan 9,29% pertahun. Dimana dengan adanya pemekaran wilayah merupakan suatu hal yang sangat baik bagi masyarakat desa Datah Bilang Baru untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidup, akan tetapi perlu dilakukan pengembangan berupa penambahan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat dan mengembangkan berbagai sektor yang ada seperti pertanian dan perkebunan.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat sudah mulai meningkat sejak dilakukan pemekaran wilayah dengan fasilitas pendidikan sudah cukup memadai, dan pemerintah terus melakukan penambahan untuk meningkatkan sarana pendidikan.

Sarana pendidikan yaitu adanya peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebab dengan faktor pendidikan ini dapat menentukan setiap tindakannya terutama dalam mengelola setiap kegiatan usaha, misalnya cepat menerima informasi pada berbagai sektor kegiatan usaha yang berasal dari berbagai sumber informasi, baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Todong (2008:93) dimana pendidikan hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup. Pendidikan memegang peranan penting bagi suatu daerah dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, disisi lain pendidikan sampai taraf tertentu kini sudah disadari menjadi kebutuhan dasar penduduk dan tolak ukur kemampuan bangsa.

Umumnya makin tinggi pendidikan seseorang semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga sarana teoritis semakin terbuka kesempatan kerja baginya untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian pendidikan pada dasarnya dapat dipandang sebagai investasi yang imbalannya baru dapat dinikmati beberapa waktu kemudian dalam bentuk pertambahan kemampuan dan ketrampilan kerja.

Tingkat pendidikan di Desa Datah Bilang Baru sebelum pemekaran wilayah hanya memiliki bangunan PAUD dan TK masing-masing 1 unit dan untuk bangunan SD pada saat itu masih dalam proses sehingga masih ikut di bangunan SD di desa sebelah, akan tetapi untuk bangunan gedung SMA diutamakan terlebih dahulu pembangunan dikarenakan jumlah siswa lebih banyak dan bisa bergantian dengan siswa SMP. Jumlah siswa SMP dan SMA lebih banyak, maka dari itu bangunan lebih di utamakan dibandingkan gedung SD dan jarak bangunan SD dengan Desa Datah Bilang Baru tidak terlalu jauh. Saat ini bangunan gedung SMA sudah berjalan selama kurang lebih 7 tahun dengan fasilitas yang cukup mendukung dalam pendidikan. Sedangkan untuk bangunan SD dan SMP sampai saat ini dalam tahap pembangunan yang diperkirakan akan rampung akhir November tahun 2019. Setelah dilakukan pemekaran tingkat pendidikan dan bertambahnya gedung sekolah baik SMA, semakin lebih baik dan kesejahteraan masyarakat juga semakin lebih baik, dikarenakan banyak orangtua yang semakin peduli akan pendidikan anak untuk memperbaiki tingkat kehidupan perekonomian dengan menyekolahkan anaknya, agar menjadi orang yang berpendidikan. Dampak sarana pendidikan yang semakin baik bagi kesejahteraan masyarakat adalah dengan menciptakan sebuah masyarakat yang berdaya tinggi, berpendidikan, cerdas dan intelektual yang sesuai dengan tujuan dari pemekaran wilayah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendidikan yang lebih baik.

3. Kesehatan

Dengan adanya pemekaran wilayah tingkat kesehatan semakin membaik dimana masyarakat lebih mudah dalam memperoleh akses kesehatan dibandingkan sebelum dilakukan pemekaran wilayah dengan didukung oleh data sebagai berikut.

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Irawan, dkk (2007:61) berpendapat bahwa pentingnya kesehatan bagi masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu unsur penting dari kesejahteraan masyarakat usaha pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar bilamana kesehatan masyarakat banyak terganggu.

Sarana kesehatan sebelum pemekaran hanya memiliki Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit, sedangkan setelah pemekaran dilakukan bertambah sarana kesehatan berupa posyandu sebanyak 1 unit. Pembangunan kesehatan di Desa Datah Bilang Baru dititik beratkan pada peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, dengan melihat dari tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah atau Negara. Semakin baik tingkat kesehatan seseorang maka, hal ini cenderung akan lebih meningkatkan produktivitas seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Adanya suatu pemekaran desa tersebut sangat berdampak positif untuk kesehatan masyarakat. dengan adanya pemekaran desa dapat meningkatkan sarana kesehatan masyarakat, artinya disamping jaraknya sudah semakin dekat dengan rumah warga, juga pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat baik karena pelayanannya bukan saja berdasarkan pada hubungan formal tetapi juga hubungan informal, sehingga masyarakat merasa puas dilayani. Sebelum pemekaran dilakukan sarana kesehatan yang ada di Desa boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat harus menempuh jarak 3 Km untuk melakukan pemeriksaan. Namun dengan pemekaran ini Desa Datah Bilang Baru dapat memberikan pelajaran tersendiri untuk masyarakat Desa Datah Bilang Baru, tentang kemandirian dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan yang ada didesa dan dengan pemekaran ini, maka Desa Datah Bilang Baru sudah dapat melakukan pemeriksaan di desa sendiri tanpa harus pergi ke desa lain.

Sarana kesehatan pertama kali adalah berupa posyandu yang berjalan sampai saat ini hampir 4 tahun dan pelayanannya 2 kali dalam seminggu yang hanya melayani para ibu dan anaknya yang ingin melakukan penimbangan dan cek kesehatan berupa kadar gizi ibu hamil, bayi, dan balita semakin sehat dan terkontrol asupan gizinya. Semenjak pemekaran wilayah dilakukan sarana kesehatan semakin lebih baik lagi dalam mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat, ibu hamil, bayi dan balita semakin sehat, sehat sehingga tidak ada kendala yang dapat menyebabkan seorang ibu hamil dan bayi meninggal akibat penanganan yang kurang maksimal. Dengan semakin tingginya kesehatan ibu dan anak membuat sarana kesehatan lebih baik dan tingkat

kesejahteraan terlaksana sesuai tujuan yang diinginkan menciptakan masyarakat yang sehat.

Seiring waktu dan pemekaran wilayah serta bertambahnya jumlah posyandu dan puskesmas membuat masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengobatan atau pemeriksaan kesehatan. Dengan adanya perbaikan sarana kesehatan tentu saja mendukung upaya pemerintah untuk Indonesia Sehat, dengan sehat maka masyarakat akan semakin giat bekerja untuk memperbaiki taraf perekonomian keluarganya, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin lebih baik.

Faktor yang Mempengaruhi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan

Faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Datah Bilang Baru berupa pembenahan akses jalan yang perlu diperbaiki dan dibenahi agar transportasi mudah dijalani dan penambahan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menampung para pencari kerja.

Faktor yang menjadi kendala dalam pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat adalah berupa sarana jalan yang perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan yang harus dilakukan secara cepat, sehingga pemekaran wilayah semakin lebih cepat dalam meningkatkan kemajuan dalam pendapatan masyarakat. Selanjutnya faktor pekerjaan yang harus ditambah dan ditingkatkan dengan penciptaan lapangan kerja baru dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang semakin terus bertambah dari segi kebutuhan dan pengeluaran. Dua faktor tersebut sangat mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah di Desa Datah Bilang Baru. Selain kedua faktor tersebut pendapatan perkapita yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan, pendidikan yang kurang dalam hal ini keterbatasan sumber daya manusia dan gedung bangunan sekolah yang belum selesai serta sarana kesehatan yang belum lengkap dari fasilitas dan tenaga medis yang masih kurang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Faktor pendukung dalam pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik hanya saja saat ini pemerintah daerah terus melakukan pembenahan dan penambahan fasilitas kesehatan dari segi peralatan medis, tenaga medis dan gedung bangunan berupa puskesmas dan kesehatan hanya saja pemerintah mengalami kendala berupa keterbatasan dana dalam pembangunannya, tingkat pendidikan yang mampu menunjang jenjang karier dalam pekerjaan dengan menambah jumlah guru dan membangun beberapa sekolah yang saat ini masih dalam proses pengerjaan dan tentu saja tingkat pendapatan yang lebih baik akan mampu tercipta dan tingkat kesejahteraan akan semakin lebih baik lagi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dampak pemekaran wilayah berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini dilihat dari beberapa aspek.
 - a. Pendapatan perkapita yang diperoleh masyarakat selama satu tahun dimana pendapatan masyarakat di Desa Datah Bilang Baru mengalami peningkatan setelah pemekaran sebesar Rp.928.333 dengan tingkat persentase kenaikan 9,29% pertahun karena Pemerintah Desa selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
 - b. Kesehatan hal yang paling utama dalam mencapai kesejahteraan dimana menunjukkan peningkatan dari segi sarana dan fasilitas karena telah berdiri satu unit Posyandu Desa, sebelum pemekaran sarana kesehatan tersebut belum tersedia secara lengkap, namun setelah pemekaran tingkat kesehatan masyarakat membaik dan jumlah sarana kesehatan bertambah menjadi 2 unit, fasilitas, dokter 1 orang, perawat 7 orang, bidan 2 orang dan sudah cukup tersedia, sehingga tingkat kesehatan masyarakat semakin membaik dan masyarakat desa tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan pengobatan.
 - c. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana pendidikan sebelum pemekaran hanya terdapat bangunan 2 sekolah saja yaitu TK dan PAUD, namun setelah pemekaran jumlah ketersediaan sarana pendidikan bertambah menjadi tiga unit karena telah dibangun 1 gedung SMA dan untuk gedung SD dan SMP masih dalam tahap proses pembangunan.
2. Faktor yang memengaruhi pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Datah Bilang Baru berupa pembenahan akses jalan dan lapangan pekerjaan baru. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan, pendidikan yang kurang dalam hal ini keterbatasan sumber daya manusia dan gedung bangunan sekolah yang belum selesai serta sarana kesehatan yang belum lengkap dari fasilitas dan tenaga medis yang masih kurang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. Diharapkan pemerintah setempat khususnya Kabupaten Mahakam Ulu untuk lebih mempercepat akses jalan agar semakin baik untuk dilewati oleh masyarakat dan kendaraan serta mampu menambah jumlah lapangan pekerjaan khususnya meningkatkan potensi sumber daya yang ada di Desa Datah Bilang Baru.

2. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang diikuti dengan peningkatan upah minimum regional yang mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Sarana kesehatan dan pendidikan berupa gedung segera di selesaikan untuk menunjang segala aktivitas atau kegiatan operasional desa Datarah Bilang Baru untuk dapat segera mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Effendi, Bactiar, 2002. *Pembangunan Otonomi Daerah Berkeadilan Kurnia Alam Semesta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita. 2007. *Paradigma Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Poerwadarminta, WJS., 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rochajat, dkk. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosia*. Rajawali Pers.
- Subandi .2011. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Alfabeta

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang pemekaran wilayah Nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 tahun 1999 pada bab II pasal 2 dan 3.